



Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai

Abdul Rachman Saida¹ Istiqamah Bungana²

¹ Ilmu Administrasi Negara Universitas Tompotika Luwuk, Email: (rahmansaida23@gmail.com)

² Ilmu Administrasi Negara Universitas Tompotika Luwuk, Email: (istiqamahbungana2001@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Mendono secara umum berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah, yaitu melalui seleksi peserta, pendampingan, serta penyaluran bantuan secara berkala. Program ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak keluarga penerima manfaat, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan bantuan untuk usaha produktif. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman sebagian keluarga terhadap kewajiban program, keterlambatan pencairan bantuan, dan keterbatasan jumlah pendamping sosial dalam memberikan bimbingan intensif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKH memiliki peran penting dalam memperkuat aspek ketahanan keluarga, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Akan tetapi, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pendampingan, peningkatan kesadaran peserta, serta koordinasi yang lebih baik antara pihak pemerintah dan masyarakat penerima manfaat.

Kata Kunci: Implementasi, PKH, Mewujudkan Ketahanan

ABSTRACT

This study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Mendono Village generally ran according to the mechanisms established by the government, namely through participant selection, mentoring, and regular aid distribution. This program contributed to improving access to education and health for children in beneficiary families, and encouraged economic independence through the use of aid for productive businesses. However, there were still obstacles such as limited understanding of program obligations by some families, delays in aid disbursement, and a limited number of social assistants to provide intensive guidance. Thus, it can be concluded that PKH plays an important role in strengthening family resilience, both in terms of economics, education, and health. However, the program's effectiveness still needs to be improved through optimizing mentoring, increasing participant awareness, and better coordination between the government and beneficiary communities.

Keywords: Implementation, PKH, Realizing Resilience

PENDAHULUAN

Ketahanan keluarga, yang juga dikenal sebagai family strength atau family resilience, mengacu pada kemampuan untuk memastikan kecukupan dan kontinuitas akses terhadap pendapatan serta sumber daya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berkontribusi dalam masyarakat, dan integrasi sosial (Prayitno et al., 2021). Pentingnya penguatan ketahanan keluarga dalam berbagai sendi keluarga mulai dari aspek ekonomi maupun sosial. Ketahanan keluarga dapat membantu menguatkan fungsi keluarga dalam membentuk kesiapan ekonomi serta karakter generasi muda bangsa di tengah tantangan keluarga yang semakin berat termasuk menanggulangi kemiskinan (Mutmainah et al., 2021).

Kemiskinan adalah masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. Salah satu indikator kondisi sosial dan ekonomi yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah adanya kemiskinan itu sendiri (Priseptian & Primandhana, 2021). Kemiskinan adalah sebuah masalah serius yang masih dihadapi Indonesia dalam proses pembangunan ekonominya. Saat ini, sekitar 24% dari total 240 juta penduduk Indonesia hidup dalam kondisi miskin. Angka ini merujuk pada mereka yang memiliki pendapatan tahunan di bawah \$1 (Sinurat, 2020).

Masalah kemiskinan memiliki beberapa penyebab, antara lain: (1) adanya perbedaan pola kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata, (2) perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan (3) adanya teori lingkaran setan kemiskinan. Upaya untuk mengatasi kemiskinan telah dilakukan sejak lama oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, yang meluncurkan berbagai program untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat (Pratiwi et al., 2021). Langkah nyata pemerintah saat ini untuk menangani ketimpangan ekonomi dengan telah menerapkan kebijakan yang fokus pada pemberian stimulus melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial sekaligus memberdayakan keluarga-keluarga yang membutuhkan (N. R. M. S. M. W. Ibrahim, 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah wujud program bantuan sosial bersyarat. Artinya setiap masyarakat yang menjadi peserta sasaran program memiliki kewajiban yang ditentukan Kementerian Sosial sebagai syarat penerima bantuan (Saragi et al., 2021). PKH merupakan inisiatif pemberian bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sejak tahun 2007. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada keluarga yang sangat miskin, dengan berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari

Program Perlindungan Sosial, PKH mengusung konsep Conditional Cash Transfers (CCT) dan terbukti cukup efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi berbagai negara, khususnya dalam menangani isu kemiskinan kronis(Albar, R., & Syamsudin, S. 2021)

Istilah "keluarga miskin" dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merujuk pada "keluarga penerima manfaat" (KPM). Artinya, masyarakat yang berstatus KPM berhak menerima berbagai bentuk bantuan, baik yang berupa tunai maupun non-tunai, serta akses kepada layanan kesejahteraan lainnya. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menuju kondisi yang lebih baik(Nadilla et al., 2021).PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek, sekaligus memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Dengan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan terjaganya taraf hidup masyarakat, diharapkan akan memberikan peluang bagi mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya Putri, A. A. (2020).

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Bantuan yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, dalam praktiknya justru tidak jarang juga diterima oleh masyarakat yang tergolong cukup mampu. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial dan kekecewaan, khususnya bagi keluarga miskin yang merasa berhak namun tidak mendapatkan bantuan.

Selain itu, permasalahan lain yang turut mengemuka adalah jumlah masyarakat yang membutuhkan masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan kuota penerima yang tersedia. Bahkan, terdapat kasus di mana penerima bantuan yang seharusnya sudah tidak lagi berhakmisalnya karena telah meninggal duniamasih tercatat sebagai penerima PKH. Sementara itu, meskipun telah diajukan nama pengganti dari keluarga lain yang layak menerima, kenyataannya penerima bantuan tetap tidak mengalami perubahan. Hal ini semakin mempertegas adanya kelemahan dalam mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi penerima bantuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai ? 2. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhiImplementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: a. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai. b.Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan (PKH) dapat Mewujudkan Ketahanan keluarga di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai. Manfaat dapat dijadikan

bahan kajian serta studi lebih lanjut terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi serta sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki arah permasalahan yang sama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif Kualitatif, yaitu peneliti berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai. Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif meliputi (Ardiansyah et al., 2021) : Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam proses penelitian. Sejalan dengan hal tersebut Sugiyono (2016) memberikan menjelaskan Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.

Pada pelaksanaannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mendono, pendamping memiliki peran yang cukup strategis. Mereka bukan hanya bertugas menyalurkan informasi dan memastikan bantuan diterima keluarga sasaran, tetapi juga hadir untuk memberikan bimbingan, melakukan sosialisasi terkait kewajiban dan hak penerima, serta memantau perkembangan keluarga penerima manfaat dalam berbagai aspek. Melalui peran inilah implementasi PKH dapat berjalan sesuai tujuan.

1. Pendataan dan Verifikasi

Tahapan pendataan dan verifikasi merupakan langkah awal dalam memastikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran dan menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Di Kelurahan Mendono, proses ini dilakukan secara terkoordinasi antara pihak kelurahan, pendamping sosial, dan masyarakat. Pendataan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan sasaran utama keluarga dalam Desil 1 sampai Desil 4 kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Dalam proses pendataan dan verifikasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mendono, pendamping sosial berperan penting sebagai pelaksana teknis di lapangan yang memastikan bahwa calon penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Disimpulkan bahwa tahapan pendataan dan verifikasi Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan secara terkoordinasi dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Pendamping sosial berperan sentral dalam

memastikan akurasi data melalui proses validasi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kunjungan rumah, serta koordinasi dengan pihak kelurahan dan tenaga kesehatan. Proses ini dinilai cukup transparan dan berjalan baik karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam verifikasi kondisi pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, mekanisme pendataan dan verifikasi di Kelurahan Mendono berkontribusi dalam menjaga ketepatan sasaran serta keberlanjutan program bagi keluarga yang memenuhi kriteria kesejahteraan terendah.

Di sisi lain, hasil wawancara juga menunjukkan adanya beberapa catatan penting sebagai bahan evaluasi, terutama terkait pembaruan data dan pemerataan penerima bantuan. Sebagian KPM menilai masih terdapat data lama yang belum diperbarui dan keluarga miskin yang belum terakomodasi dalam DTKS. Aparat kelurahan dan tenaga kesehatan menekankan pentingnya survei lapangan yang lebih cermat dan berkala agar data penerima manfaat semakin akurat. Secara keseluruhan, implementasi PKH di Kelurahan Mendono telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli keluarga miskin, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek verifikasi data dan evaluasi penerima secara berkelanjutan.

2. Penetapan Peserta

Tahapan penetapan peserta merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan. Di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, proses ini dilaksanakan melalui mekanisme terkoordinasi antara pendamping sosial, aparat kelurahan, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, baik pendamping sosial, keluarga penerima manfaat (KPM), maupun aparat kelurahan dan tenaga kesehatan, dapat disimpulkan bahwa tahapan penetapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mendono telah berjalan dengan terstruktur, transparan, dan partisipatif. Proses penetapan peserta dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan sasaran keluarga dalam Desil 1-4, yang kemudian diverifikasi melalui survei lapangan, pengecekan pendidikan, kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Peran pendamping sosial sangat menonjol sebagai pelaksana teknis di lapangan, mulai dari validasi data, kunjungan rumah, hingga koordinasi lintas sektor dengan pihak kelurahan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Hal ini membuat proses penetapan peserta dinilai adil, terbuka, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Sebagian besar KPM menyatakan bahwa proses penetapan telah membantu mereka memahami kriteria penerima dan memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Namun, masih terdapat beberapa catatan penting dari KPM, antara lain pembaruan DTKS yang belum dilakukan secara berkala, serta ditemukannya keluarga

yang sudah mampu namun masih tercatat sebagai penerima. Oleh karenanya, diperlukan pemutakhiran data secara rutin dan verifikasi lapangan yang lebih selektif agar tidak terjadi ketimpangan. Secara keseluruhan, para informan menilai bahwa pelaksanaan penetapan peserta PKH di Kelurahan Mendono telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, terutama dalam mendukung pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta penguatan ekonomi rumah tangga. Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan koordinasi lintas sektor yang konsisten, diharapkan program ini dapat terus berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

3. Tahapan Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) karena menjadi momen nyata di mana manfaat program dirasakan langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, proses penyaluran bantuan dilakukan secara tertib, transparan, dan terkoordinasi antara pendamping sosial, aparat kelurahan, dan pihak perbankan penyalur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Kelurahan Mendono, dapat disimpulkan bahwa tahapan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum berjalan lancar, transparan, dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Penyaluran bantuan dilakukan melalui rekening masing-masing penerima manfaat sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan memperkuat akuntabilitas program. Peran pendamping sosial, aparat kelurahan, serta tenaga kesehatan sangat krusial dalam memastikan bantuan benar-benar diterima oleh keluarga penerima sesuai jadwal.

Proses koordinasi lintas sektor juga terbukti efektif dalam menjaga kelancaran distribusi bantuan dan memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada keluarga miskin. Meskipun pelaksanaan penyaluran bantuan sudah tergolong baik, sebagian informan menilai masih diperlukan peningkatan dalam hal pembaruan data dan pengawasan penggunaan bantuan.

Pembaruan data penting dilakukan agar penerima manfaat tetap relevan dengan kondisi ekonomi terkini, sementara pengawasan diharapkan dapat memastikan bahwa dana bantuan digunakan sesuai peruntukan, terutama untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizianak. Selain itu, peningkatan literasi keuangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga menjadi kebutuhan mendesak agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial keluarga penerima dalam jangka panjang.

4. Pendampingan (FDS)

Pendampingan melalui Family Development Session (FDS) merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), karena menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar tidak hanya

bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara mandiri. Di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, kegiatan FDS dilaksanakan secara rutin dan terkoordinasi antara pendamping sosial, aparat kelurahan, serta tenaga kesehatan.

Tahapan pendampingan (Family Development Session/FDS) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mendono merupakan bagian penting yang tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan material, tetapi juga pada pembentukan perilaku dan peningkatan kapasitas keluarga penerima manfaat. Melalui kegiatan FDS, pendamping sosial bersama aparat kelurahan dan tenaga kesehatan memberikan edukasi seputar pentingnya pendidikan anak, kesehatan ibu dan balita, serta pengelolaan ekonomi rumah tangga.

Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran sosial yang membantu keluarga miskin memahami cara mengoptimalkan bantuan yang diterima agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Proses pendampingan dilaksanakan secara rutin dan terkoordinasi, dengan pendekatan partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif setiap peserta dalam diskusi dan kegiatan kelompok.

Secara umum, hasil pendampingan menunjukkan bahwa kegiatan FDS memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan pola pikir dan perilaku keluarga penerima manfaat di Kelurahan Mendono. Keluarga menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan, serta mulai menerapkan kebiasaan hidup yang lebih terarah dan mandiri. Meski demikian, masih dibutuhkan peningkatan dalam hal intensitas kegiatan, kualitas materi, dan metode penyampaian agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat. Dukungan lintas sektor antara pendamping sosial, aparat kelurahan, dan tenaga Kesehatan perlu terus diperkuat agar tahapan pendampingan dapat berjalan konsisten dan memberikan dampak jangka panjang terhadap upaya pengentasan kemiskinan di tingkat keluarga.

5. Monitoring dan Evaluasi

Tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), karena berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses program berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak nyata bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh pendamping sosial bekerja sama dengan aparat kelurahan serta tenaga kesehatan.

Hasil wawancara dengan aparat kelurahan dan bidan di Kelurahan Mendono, dapat disimpulkan bahwa tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) berjalan cukup baik dan terkoordinasi antara berbagai pihak. Aparat kelurahan berperan dalam mendukung proses pengumpulan dan validasi data, sedangkan bidan berkontribusi dalam pemantauan aspek kesehatan keluarga penerima manfaat.

Keduanya menilai bahwa kegiatan Monev penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, terutama dalam menilai perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Namun demikian, mereka menekankan perlunya peningkatan kapasitas tenaga pelaksana Monev dan sistem pelaporan yang lebih digital agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan program di tingkat lokal.

Tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mendono merupakan komponen penting yang berfungsi untuk menilai efektivitas, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program. Melalui kegiatan Monev, pendamping sosial bersama aparat kelurahan dan tenaga kesehatan melakukan observasi lapangan, mencatat perkembangan perilaku KPM, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan kendala.

Kegiatan ini menjadi sarana refleksi dan pembelajaran sosial yang membantu keluarga penerima manfaat tetap berada pada jalur perubahan menuju kemandirian. Proses Monev dilaksanakan secara berkala dan sistematis, dengan pendekatan kolaboratif agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai capaian dan tantangan di lapangan. Secara umum, hasil Monitoring dan Evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Mendono telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Keluarga penerima manfaat menjadi lebih terpantau dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga tujuan program semakin terarah.

Meski demikian, masih dibutuhkan peningkatan dalam hal mekanisme pelaporan, tindak lanjut hasil evaluasi, dan integrasi data antar sektor. Dukungan berkelanjutan dari pendamping sosial, aparat kelurahan, dan tenaga kesehatan menjadi kunci agar kegiatan Monev dapat terus memperkuat efektivitas PKH serta memastikan manfaat program dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mendono belum sepenuhnya terlaksana secara optimal sebagaimana tujuan awalnya, yaitu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi program ini. Mengacu pada teori George C. Edward III (Toding, 2022), keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Adapun uraian faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mendono sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi PKH. Kejelasan informasi mengenai sasaran, mekanisme, dan tujuan program harus disampaikan secara efektif dari pemerintah pusat hingga masyarakat penerima manfaat. Kurangnya komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman, salah tafsir, bahkan kecurigaan terhadap keadilan program.

Kendala komunikasi juga muncul karena keterbatasan sarana informasi, terutama di wilayah dengan akses internet terbatas. Akibatnya, pesan-pesan penting dari Dinas Sosial atau Koordinator Kabupaten tidak selalu sampai tepat waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang belum efektif antara aktor pelaksana menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam optimalisasi implementasi PKH di Kelurahan Mendono.

b. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen vital dalam implementasi kebijakan. Kualitas dan komitmen pelaksana, baik dari pendamping sosial, aparat kelurahan, maupun tenaga kesehatan dan pendidikan, sangat menentukan tercapainya tujuan program. Keterbatasan kapasitas SDM juga terlihat pada tingkat pemahaman masyarakat. Sebagian KPM belum sepenuhnya memahami prinsip conditional cash transfer (bantuan bersyarat), sehingga hanya fokus pada penerimaan bantuan padahal melaksanakan kewajiban seperti pemeriksaan kesehatan anak dan kehadiran sekolah.

2. Sumber Daya Finansial

Dari sisi keuangan, kendala muncul bukan hanya pada jumlah bantuan yang terbatas, melainkan juga pada kesiapan penerima manfaat dalam memanfaatkan dana secara produktif. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi faktor yang cukup dominan dalam menghambat efektivitas implementasi PKH di Kelurahan Mendono.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yang meliputi komitmen, kejujuran, dan integritas berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PKH. Sikap positif dari pelaksana di lapangan akan menciptakan kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat, sedangkan sikap pasif atau kurang tegas akan menimbulkan ketidakdisiplinan penerima bantuan. Dengan demikian, disposisi yang belum sepenuhnya konsisten, baik dari sisi pelaksana maupun penerima manfaat, turut mempengaruhi kualitas implementasi PKH di Kelurahan Mendono.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas, mekanisme kerja yang tertib, dan koordinasi lintas sektor yang efektif merupakan syarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks PKH, koordinasi antara Dinas Sosial, pendamping sosial, pemerintah kelurahan, tenaga pendidikan, dan kesehatan menjadi fondasi

keberlanjutan program. Struktur birokrasi yang belum terkoordinasi dengan baik turut memengaruhi efektivitas program. Sinergi antar instansi pelaksana, mulai dari pemerintah kelurahan, pendamping sosial, hingga tenaga kesehatan, masih perlu diperkuat agar pelaksanaan PKH berjalan lebih terpadu dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Meskipun pelaksanaan program telah berjalan sesuai mekanisme dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan yang menghambat tercapainya tujuan secara maksimal. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain belum efektifnya komunikasi antara pendamping sosial dan sebagian penerima manfaat (KPM), keterlambatan dalam proses pencairan bantuan, serta kurangnya partisipasi aktif penerima dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas keluarga. Selain itu, sebagian penerima manfaat masih memiliki persepsi keliru terhadap tujuan program PKH, yang dianggap sekadar sebagai bantuan sosial semata, bukan sebagai upaya pemberdayaan keluarga miskin untuk mandiri secara ekonomi. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah terbatasnya jumlah pendamping sosial dibandingkan dengan jumlah KPM, sehingga proses pendampingan tidak dapat dilakukan secara intensif dan menyeluruh. Hal ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi antara pelaksana program di tingkat kelurahan dengan pihak-pihak terkait seperti tenaga kesehatan dan pihak sekolah. Implementasi program juga menghadapi tantangan dalam aspek ketegasan pelaksana (implementor). Kurangnya pengawasan langsung dan tindak lanjut terhadap penerima manfaat yang tidak aktif dalam memenuhi komitmen PKH misalnya tidak membawa anak ke sekolah atau tidak melakukan pemeriksaan kesehatan ibuhamil dan balita menyebabkan tujuan peningkatan kualitas hidup keluarga miskin belum sepenuhnya tercapai.

Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mendono berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III meliputi: (1) Komunikasi, yaitu kurang efektifnya penyampaian informasi dan sosialisasi antara pelaksana program dengan masyarakat penerima manfaat maupun dengan pihak terkait di tingkat kelurahan, sehingga terjadi kesalahpahaman terhadap mekanisme dan tujuan program. (2) Sumber daya, yaitu keterbatasan jumlah pendamping sosial, kurangnya fasilitas pendukung kegiatan, serta rendahnya kapasitas sebagian KPM dalam memahami kewajiban mereka sebagai penerima manfaat. (3) Disposisi, yaitu belum sepenuhnya optimalnya komitmen dan konsistensi pelaksana program maupun penerima manfaat dalam menjalankan aturan PKH, di mana masih ditemukan penerima yang tidak disiplin dalam memenuhi komponen pendidikan dan kesehatan. (4) Struktur birokrasi, yaitu adanya kendala dalam mekanisme koordinasi antar instansi pelaksana di tingkat daerah, serta belum tersedianya sistem pengawasan

dan evaluasi yang berjalan secara berkesinambungan. Dengan demikian, implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mendono perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas komunikasi lintas sektor, penambahan dan pelatihan pendamping sosial, penegasan komitmen pelaksana dan penerima manfaat, serta penguatan sistem birokrasi yang lebih responsif dan akuntabel agar tujuan program dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dapat tercapai secara optimal.

SARAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai perlu lebih ditingkatkan agar tujuan utama program, yaitu mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, dapat tercapai secara optimal. Para pelaksana dan pendamping sosial diharapkan lebih tegas dan konsisten dalam mendampingi penerima manfaat, terutama dalam memastikan bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) benar-benar memenuhi kewajibannya sesuai dengan komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, R., & Syamsudin. (2021). Implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan. *Jurnal Enersia Publika*, 8(1), 1–23.
- Ibrahim, N. R. M. S. M. W. (2021). Pelaksanaan PKH Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 1–23.
- Putri, A. A. (2020). PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KOTA PADANG PANJANG (Doctoral dissertation, IPDN).
- Mutmainah, N. F., Saharuddin, E., Utsany, R., & Warastri, A. (2021). Peran Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Ketahanan Keluarga. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 538–551. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3501>
- Nadilla, H. F., Nurwati, N., & Santoso, M. B. (2021). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Anak Stunting Pada Keluarga Penerima Manfaat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39561>
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2021). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>
- Prayitno, I. H., Sofwan, E., & Ibrohim, I. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang

- Selatan. *Garda-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 70–85.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/grd/article/view/12828>
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>
- Sinurat, R. P. P. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>